BAHASA INDONESIA RAGAM BAKU: SESAT PIKIR, KEKURANGPATUHAN, DAN REKOMENDASI[1]

P. Ari Subagyo

Dosen Program Studi Sastra Indonesia
Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
(email: *ari130267@yahoo.com*)

ABSTRAK

Artikel ini membahas tiga hal. Pertama, sesat pikir tentang bahasa Indonesia (BI) dan BI ragam baku (BIRB). Kedua, kekurangpatuhan masyarakat kepada BIRB. Ketiga, beberapa rekomendasi tentang pembelajaran BIRB. Ada dua sesat pikir tentang BI dan BIRB, yaitu (a) BI disalahpahami sebagai bahasa yang sudah tua dan mapan dan (b) BIRB disalahpahami hanya berurusan dengan kaidah ejaan yang disempurnakan (terlalu sempit) atau justru dengan semua penggunaan bahasa (terlalu luas). Kekurangpatuhan masyarakat, termasuk masyarakat akademik, kepada kaidah BIRB disebabkan (a) latar kesejarahan bahasa Indonesia, (b) inkonsistensi acuan, (c) rendahnya mutu pembelajaran bahasa, (d) rendahnya minat baca dan tulis masyarakat Indonesia, serta (e) mentalitas bangsa Indonesia yang suka gandrung *pada budaya luar, termasuk bahasa asing. Dalam artikel ini juga direkomendasikan (a) pembentukan kepribadian (karakter) mahasiswa melalui perilaku ber-BIRB pada struktur makro hingga mikro, (b) pembelajaran/perkuliahan BI yang mampu mengasah kemampuan berpikir kritis, (c) keterpaduan langkah semua dosen mata kuliah apa pun untuk bersama-sama patuh pada BIRB, serta (d) keterpaduan kuliah BI dan kebiasaan ber-BIRB dengan tradisi menulis pada dosen.*

Kata kunci: *bahasa Indonesia, ragam baku, pembakuan, kaidah, kepribadian.*

1. PENDAHULUAN

> "Di tengah seribu satu Reformasi terhadap ini-itu sisa Orde Babe, ternyata belon banjak dibitjaraken masalah pembebasan bahasa nasional dari belenggu Hukum Pindana Kebudajaan yang dijuluki Soeharto cs sebagai "Bahasa baik dan benar". Padahal kitorang semua mengerti bahwa bahasa gupermen—jang ngakunja baek en bener itu—membosankennja boekan kepalang, kaku tanpa mutu, apalagi bersifat dusta en pura2. Kitorang djuga melihat bahwa bahasa jang dipake di koran2 dan madjalah2 misih sering djelek, genit-lesu, dan melelahken. Dasar si hamba suka ikut-ikutan gerakgerik tuwannja" (Anderson, 2002)

Kutipan di atas —yang ditulis dengan dialek "gado-gado" awal 1900-an— segera menebarkan aroma pertentangan (kontradiksi). Di satu sisi, pernyataan Anderson begitu melecehkan bahasa Indonesia (BI) berciri "baik dan benar" yang lazim disebut BI ragam baku (BIRB). Di sisi lain, keberadaan BIRB dinyatakan begitu penting, bahkan sebagai wujud kecintaan dan kebanggaan kepada bahasa Indonesia serta untuk pengembangan kepribadian mahasiswa (bdk. Keputusan Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (3a)).

Pernyataan Anderson—pakar antropologi politik dari Cornell University—sengaja dikutip tidak untuk membangkitkan pesimisme dan turut *meledek* BIRB, melainkan untuk menghentak kesadaran kita agar dapat melihat ihwal BI dan BIRB secara jernih. Kejernihan akan membawa pada strategi dan langkah tepat untuk memartabatkan BI dan BIRB, terutama di ranah akademik. Apalagi kolega Anderson, Siegel (1997: 8), menulis: "Sebagai *lingua franca*, bahasa Indonesia beroperasi di antara orang-orang yang berbeda-beda bahasa dan budayanya tanpa menjadi milik seorang pun." Pernyataan Siegel, terlebih bagian yang diberi garis bawah, sama maknanya dengan: BI tidak pernah menjadi milik seseorang pun. Atau, masyarakat Indonesia sesungguhnya tidak pernah merasa memiliki BI. Begitulah pula, dan terlebih-lebih, nasib BIRB.

Artikel ini tidak menggunakan kacamata preskriptif atau menilai benar-salah penggunaan BI, lalu memberikan semacam "fatwa" tentang penggunaan yang benar. Alih-alih menghakimi, penulis justru sangat memahami mengapa BI sulit dibakukan dan BIRB tidak mudah dimasyarakatkan, termasuk di kalangan akademik. Bagaimana pun BI—dan bahasa apa pun—merupakan buah peradaban yang meng-ada (menjadi *being*) bersama dengan manusia Indonesia, lengkap dengan dinamika sejarah dan sosiokulturalnya. Ini sejalan dengan pandangan dalam ekologi bahasa, misalnya Fill dan Mühlhäusler (2001), yang berasumsi bahwa perkembangan dan daya hidup (vitalitas) suatu bahasa ditentukan oleh lingkungan fisik dan sosiokulturalnya.

Pembicaraan dalam artikel ini dipicu tiga pertanyaan. Pertama, apa saja sesat pikir yang muncul tentang BI dan BIRB? Kedua, mengapa masyarakat, termasuk masyarakat akademik, sulit mematuhi kaidah-kaidah BIRB? Ketiga, bagaimana mengupayakan pembentukan kepribadian mahasiswa lewat perilaku berbahasa yang taat kaidah?

2. SESAT PIKIR TENTANG BI DAN BIRB

Selama ini, ada dua "sesat pikir" seputar BI dan BIRB yang hidup subur di benak masyarakat. Sesat pikir pertama, BI dianggap sudah tua dan mapan. Benar bahwa Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 yang mengikrarkan "*Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean bahasa Indonesia*" telah terjadi 86 tahun lalu. Namun, BI sesungguhnya masih muda dan jauh dari mapan. Kemudaan dan kekurangmapanan BI dapat dijelaskan lewat lacakan ekologis-historis berikut ini.

Ketika disebut dalam Soempah Pemoeda, BI sesungguhnya belum jelas sosoknya. Nama "bahasa Indonesia" baru disepakati pada hari terakhir Kongres Pemoeda Indonesia (*Indonesiaische Jeugdcongres*), 30 April s.d. 2 Mei 1926 di Batavia (Alisjahbana, 1991: 102; Kridalaksana, 2013). Ikrar pertama dan kedua (tentang "tanah air Indonesia" dan "bangsa Indonesia") sudah berhasil disepakati. Namun, sampai pada ikrar ketiga, terjadi perdebatan tentang bahasa. Yang sudah digunakan luas adalah bahasa Melayu (BM), namun nama itu tidak senafas dengan negara-bangsa Indonesia. Tabrani lalu mengusulkan nama "bahasa Indonesia". Jadi, baru pada 2 Mei 1926 lahir nama "bahasa Indonesia".

Lalu, seperti apakah sosok BI waktu itu? Tentu saja wajah utama BI adalah BM yang secara umum mirip dengan bahasa para penghuni semenanjung Malaya (Malaysia, Brunei, Singapura, Riau). Namun, BM yang menjadi embrio BI bukanlah ragam standar milik kalangan istana, melainkan BM pasar (BMP) yang biasa digunakan dalam kegiatan jual-beli. Yang penting "bisa saling tahu" (Jawa: *angger padha mudhenge*). Selain dipenuhi bentuk-bentuk tidak resmi, BMP juga sangat kaya variasi dialektal: BM Betawi, BM Ambon, BM Padang, dsb. Di kota-kota niaga, BM di Nusantara identik dengan

bahasa etnis peranakan Tionghoa sebab merekalah pelaku utama perniagaan, misalnya BM di Jakarta, Semarang, Surabaya, Surakarta, Palembang, Medan dan kota-kota lainnya. Kenyataan itu tidak melemahkan, tetapi justru menguatkan tesis bahwa BM telah menjadi *lingua franca* (bahasa pergaulan) di Nusantara, termasuk digunakan oleh kaum penjajah. Memang sejak menguasai Nusantara sejak abad ke-16, penguasa kolonial praktis menggunakan BMP untuk menjalankan pemerintahan. Dalam ranah hukum, sebelum *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) menundukkan Portugis dan menguasai Nusantara pada Maret 1602, telah disusun *Undang-undang Malaka* yang menggunakan BM, yakni sewaktu pemerintahan Sultan Muhammad Syah (1422-1444) dan Sultan Muzaffar Syah (1445-1458) (Fang, 2011: 523). Kumpulan peraturan tersebut mencakup Undang-undang Laut, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perdagangan dan Syahadat, Undang-undang Negeri, dan Undang-undang Johor. Aturan-aturan itu lalu digunakan pula di berbagai kerajaan (Islam) di Sumatera, termasuk Aceh (bdk. Collins, 2011: 24). Adapun VOC mulai menggunakan BM dalam pengadilan di Ambon sejak tahun 1632, diawali oleh seorang panitera bernama Jan Paijs (Collins, 2011: 63). Karena itu, dapat dimaklumi jika Mrázek (2002) menyebut BM dan BI sebagai "aspal bagi kolonial".

Adapun menurut lacakan Subagyo (2013), selama 1856-1928 telah terjadi revolusi BM menjadi BI. Ada enam pemicu, yaitu (a) hadir dan maraknya persuratkabaran dengan BM, (b) menggeliatnya penerbitan dengan BM, (c) lahirnya angkatan sastrawan dengan BM, (d) meluasnya penyebaran agama (dakwah, misi, dan zending) dengan BM, (e) bergiatnya pendidikan dengan BM, serta (f) tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Indonesia. Melalui perkembangan revolusioner itu, meski sosoknya belum jelas, BI mampu memenuhi tugas sejarah dan tugas peradaban sebagai bahasa persatuan. BI mampu mempersatukan "komunitas terbayang" (*imagined community*) bernama bangsa Indonesia (lih. Anderson, 1991). Bahkan, berkat BI-lah sejarah bangsa Indonesia dimulai, dan dari situlah terbangun nasionalime Indonesia (bdk. Siegel, 1997: 8).

Meskipun demikian, penting dicatat bahwa sosok BM Pra-Indonesia (atau pra-BI) sebenarnya tidak tunggal. Terlebih karena situasi sosiokultural masyarakat Indonesia amat majemuk. Oleh sebab itu, sejak 1928 dilakukan berbagai upaya untuk lebih menegaskan sosok BI, terutama lewat angkatan sastrawan Pujangga Baru (1933), persuratkabaran dan penerbitan, administrasi pemerintahan, penyebaran agama, Kongres I BI (1938), sekolah ber-BI, dan medan politik. Langkah politik dilakukan fraksi nasional dalam Volksraad yang dipimpin M. Hoesni Thamrin. Mereka memutuskan untuk menggunakan BI dalam penyampaian pandangan umum di dewan rakyat tersebut (lih. Kridalaksana, 1991: 238).

Kehadiran Jepang yang relatif singkat berdampak positif bagi perkembangan BI karena pemerintah pendudukan Jepang berusaha meraibkan pengaruh Belanda secara revolusioner. Bahasa Belanda diharamkan dan "komisi istilah" untuk pengembangan kosa kata BI didirikan. Semangat untuk memutus pengaruh bahasa Belanda berlanjut setelah kemerdekaan, termasuk lahirnya Edjaan Soewandi atau Edjaan Repoeblik (1947).

Terlepas dari penggal sejarah 1950-an hingga 1965, revolusi besar terhadap BI terjadi selama Orde Baru. Didorong oleh motif menghilangkan keterikatan ideologis dengan Orde Lama (yang identik dengan pemikiran-pemikiran Soekarno), penguasa Orde Baru mendorong BI menjadi "bahasa baru". EYD yang digagas sejak 17 Agustus 1967, dan diresmikan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03/A.I/72 tanggal 20 Mei 1972, lalu diperkuat dengan SK Presiden No. 52 tertanggal 17 Agustus 1972, sangat beraroma ideologis. Selain disebut EYD, ejaan itu juga lazim dinamai

"ejaan baru" yang dipertentangkan dengan "ejaan lama" yang terkesan kuno dan layak ditinggalkan. EYD ("ejaan baru") merupakan representasi permulaan revolusi ideologi lewat bahasa.

Revolusi berikutnya terjadi seiring dengan pengembangan dunia keilmuan. BI sangat miskin kosa kata ilmiah sehingga dibukalah gerbang untuk peminjaman (*borrowing*) istilah-istilah keilmuan, terutama dari bahasa Latin dan Inggris. Ini menjadi konsekuensi logis sekaligus awal bagi pembentukan identitas BI sebagai bahasa ilmu, yang—ironisnya—sekaligus menjadi awal kaburnya jatidiri BI. Kekesalan dan ungkapan tak berdaya atas dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dapat dibaca dalam opini di harian *Kompas* berjudul "Melawan Dominasi Bahasa Inggris, Mungkinkah?" (Subagyo, 2007), "Masalah Utama Bahasa Indonesia" (Subagyo, 2008), dan "Menghalalkan Bahasa Indonesia" (Subagyo, 2009). Pendek kata, BI sebagai bahasa keilmuan sungguh masih muda dan belum mantap, bahkan lalu terkesan sebagai "bahasa karbitan".

Sesat pikir kedua, BIRB seolah-olah hanya berurusan dengan kaidah ejaan yang disempurnakan (EYD), atau justru menyangkut semua penggunaan bahasa. Pemahaman pertama terlalu sempit, sedangkan pemahaman kedua terlalu luas. Perlu diluruskan bahwa BIRB tidak hanya mencakup kaidah EYD. Kaidah EYD tentu saja penting, tetapi itu hanya sebatas mengatur tata penulisan huruf, angka, dan tanda baca. Ada kaidah lain yang menyangkut tataran kebahasaan yang lebih besar/tinggi, yaitu (1) tata kata (morfologi), (2) tata makna dan istilah (morfologi dan semantik), (3) tata frasa dan kalimat (sintaksis), serta (4) tata wacana. Dibandingkan EYD, terutama (3) dan (4) jauh lebih penting sebab menyangkut logika kalimat, keruntutan penalaran, dan daya kritis pengguna bahasa.

Perlu diluruskan pula bahwa BIRB tidak pada tempatnya digunakan pada semua situasi dalam pergaulan sehari-hari. BIRB ibarat stelan jas yang hanya cocok digunakan untuk acara-acara resmi. Pemahaman yang tidak pas tentang konteks waktu dan tempat penggunaan BIRB justru akan (bahkan telah) melahirkan ejekan dan cemoohan kepada BIRB, seperti ditulis Anderson (2002) yang dikutip di awal tulisan ini. Penggunaan BIRB tanpa hirau konteks ibarat memakai stelan jas untuk memancing di empang: konyol dan tidak perlu!

3. KEKURANGPATUHAN KEPADA KAIDAH BIRB

Pembakuan (standardisasi) merupakan serangkaian upaya untuk memantapkan sosok (korpus) sebuah bahasa sebagai konsekuensi dari peran resmi yang diembannya. Dalam perencanaan bahasa (*language planning*), pembakuan menjadi bagian dari kodifikasi atau perencanaan korpus (*corpus planning*) (lih. Wardhaugh, 1992). Langkah itu meliputi penyusunan tata bunyi, tata ejaan, tata kata, tata istilah, tata frasa, tata kalimat, tata wacana, kamus besar, kamus-kamus teknis, dan pedoman-pedoman praktis yang berkaitan dengan penggunaan ragam-ragam suatu bahasa. Pembakuan BI tidak terelakkan sebab BI mengemban dua kedudukan penting, yaitu sebagai bahasa persatuan (bahasa nasional) sejak Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 serta sebagai bahasa negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, Pasal 36.

Dalam Seminar Politik Bahasa Nasional (1975), dua kedudukan itu dijabarkan lebih lanjut. Sebagai bahasa persatuan, BI berfungsi menjadi (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar sosial-budaya dan bahasa yang berbeda, serta (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Adapun sebagai bahasa negara, BI berfungsi menjadi (1) bahasa resmi negara, (2) bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan

pemerintahan, serta (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu penge-tahuan, dan teknologi. Dua kedudukan dan delapan fungsi itu membuat BI sebagai bahasa paling utama dalam komunikasi masyarakat Indonesia. Karenanya, pembakuan sangat diperlukan agar komunikasi berjalan dengan baik dan ada patokan/rujukan yang jelas. Itulah esensi keberadaan BIRB: menjamin lancarnya komunikasi karena semua pihak menggunakan patokan/rujukan yang sama.

Mengapa masyarakat, termasuk masyarakat akademik, kurang mematuhi kaidah-kaidah BIRB? Setidaknya ada lima penyebab. Pertama, adanya latar kesejarahan BI yang tidak sejalan dengan orientasi kebijakan pembakuan BI. Secara historis, awalnya BI mengikuti bahasa Belanda (BB) sebab Indonesia merupakan jajahan Belanda. Namun, sejak Indonesia merdeka (1945), BI lebih berorientasi pada bahasa Inggris (BE) sebab BE menjadi *lingua franca* dunia dan bahasa internasional yang paling utama. Akibatnya, sebagian masyarakat menggunakan kata, misalnya, *analisa* dan *metamorfosa* yang terpengaruh BB, sedangkan sebagian yang lain menggunakan kata *analisis* dan *metamorfosis* yang terpengaruh BE. Penting dicatat, resistensi besar pernah terjadi di kalangan terdidik awal bangsa Indonesia yang nyaris semua hasil didikan Belanda. Mereka merasa lebih *sreg* menggunakan bahasa Jawa dan BB.

Kedua, adanya inkonsistensi acuan. Yang dirujuk penulisan atau pengucapannya? Periksa pasangan-pasangan kata berikut ini:

Bahasa Indonesia	Bahasa Malaysia
sepeda (Belanda *velocipede*)	*basikal* (Inggris *bicycle*)
karcis (Belanda *kaartjes*)	*tiket* (Inggris *ticket*)
kopor (Belanda *koffer*)	*beg* (Inggris *bag*)
ban (Belanda *band*)	*tayar* (Inggris *tyre*)
sekering (Belanda *zekering*)	*fius* (Inggris *fuse*)

Terkait dengan masalah pertama dan kedua, tampak jelas bahwa bahasa Malaysia (BM di Malaysia) jauh lebih konsisten. Acuannya bahasa Inggris dan penulisan mengikuti pengucapan. Periksa perbandingan berikut ini (diambil dari Prentice, 1991: 186):

Ketiga, masih rendahnya mutu pembelajaran Bahasa Indonesia. Kurikulum silih berganti seiring dengan pergantian menteri. Pendekatan datang dan pergi, para guru/dosen pun berusaha mengikuti dengan setengah mati. Namun, selalu terlupa bahwa bahasa adalah pikiran; pembelajaran bahasa adalah pembelajaran berpikir dan cara berpikit. Praktik menjadi penting, dan guru/dosen seyogianya sekaligus sebagai praktisi yang sanggup memberi teladan, terutama dalam berbicara dan menulis. Dalam kenyataannya, guru/dosen Bahasa Indonesia hanya sebagian sangat kecil yang mampu berbicara dan menulis secara bernalar dan tertata rapi.

Keempat, rendahnya budaya baca dan tulis masyarakat Indonesia. Minat baca masyarakat Indonesia terendah di ASEAN. Menurut hasil survei UNESCO tahun 2013, indeks minat baca masyarakat Indonesia 0.001. Artinya, di antara 1000 orang, hanya ada 1 orang yang berkebiasaan membaca. Jumlah judul buku yang terbit setiap tahun juga sedikit, yaitu 18.000 judul/tahun. Sebagai pembanding, di Jepang terbit 40.000 judul/tahun, di India 60.000 judul/tahun, dan di Cina 140.000 judul/tahun. Budaya tulis juga rendah. Hadirnya perangkat komunikasi seperti telefon seluler, internet,

manajemen vs managemen	Perancis vs Prancis	memperoleh vs memeroleh
marjinal vs marginal	jadual vs jadwal	memperhatikan vs memerhatikan
marjin vs margin	kuitansi vs kwitansi	kreativitas vs kreatifitas
jender vs gender	kualitas vs kwalitas	standar vs standard

dan media sosial memang meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia dalam menulis. Namun, yang ditulis bukanlah gagasan konseptual yang canggih. Alih-alih mengembangkan budaya tulis yang sesungguhnya, komunikasi tertulis lewat ponsel, internet, dan media sosial sekadar menyalurkan hasrat berkawan. Fenomena itu menguatkan dugaan Teeuw (1994) bahwa mayoritas masyarakat Indonesia "melompat" dari budaya khirografik (mendengar) ke dalam budaya elektronik (mendengar dan menonton) tanpa melalu budaya baca-tulis yang sungguh-sungguh mendarah-daging. Saat budaya baca belum kuat benar, mereka dimanja tradisi pascabaca (mendengar dan menonton) khas tahap elektronik. Budaya baca lalu teraborsi: belum utuh, tetapi sudah harus mati.

Kelima, mentalitas bangsa Indonesia yang suka *gandrung* pada budaya luar. Dalam hal bahasa, globalisasi semakin memperkukuh apa yang oleh Phillipson (1992) disebut "imperialisme bahasa" (*linguistic imperialism*). Kehadiran bahasa asing memang tak terhindarkan. Namun, mentalitas *inlander* cenderung membuat masyarakat Indonesia kehilangan kesadaran, termasuk dalam "kesetiaan bahasa" (*language loyalty*). Keadaan semacam ini membuat BIRB makin jauh dari selera masyarakat, terutama bagi kaum muda, termasuk siswa dan mahasiswa.

4. BEBERAPA REKOMENDASI

Bagaimana mengupayakan pembentukan kepribadian (mahasiswa) lewat perilaku berbahasa yang taat kaidah? Berikut ini dikemukakan beberapa rekomendasi.

Pertama, penting dipahami bahwa perilaku berbahasa sangat berkaitan dengan perilaku lain. Ada ataupun tidak ada Keputusan Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006, mata kuliah Bahasa Indonesia—dan mata kuliah apa pun—pada hakikatnya merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK). Karena itu, pendampingan perilaku berbahasa (termasuk belajar patuh pada BIRB) merupakan pembentukan perilaku dan kepribadian. Pembentukan terjadi dari keseharian mahasiswa bergulat dengan struktur makro hingga struktur mikro, seperti tersaji dalam tabel berikut ini (kolom pertama dan kedua mengikuti Baryadi, 2002: 16):

Struktur	Unsur	Perilaku	Segi Kepribadian
Struktur Makro	Tema/TopikWacana (Apa yang dikatakan?)	Memilih/menentukan tema/topik	Bersikap kritis dan peduli pada masalah di sekitarnya
Superstruktur	Skema Wacana (Bagaimana pendapat disusun dan dirangkai?)	Membuat kerangka karangan	Berpikir menyeluruh (holistis) dan tertata (sistematis)
Struktur Mikro	Arti/Makna/Maksud (Apa arti pendapat yang disampaikan)	Memilih arti/makna/maksud pendapat yang akan disampaikan	Berpikir/bersikap menghargai orang lain
Struktur Mikro	Bentuk Pernyataan/Kalimat, Penekanan, dll. (Bagaimana pendapat disampaikan?)	Memilih/menentukan bentuk pernyataan/kalimat, penekanan, dll. untuk menyatakan arti/makna/ maksud	Berbicara/menulis secara lugas, tertata, santun, dan empatik
Struktur Mikro	Kata Kunci (Pilihan kata apa yang dipakai?)	Memilih/menentukan kata/ istilah secara tepat	Berbicara/menulis dengan pilihan kata/istilah yang tepat
Struktur Mikro	Gaya, Interaksi, Ekspresi, Metafora, Gestur, Mimiek, Ejaan (Dengan cara apa pendapat disampaikan?)	Memilih/menentukan cara yang cermat untuk menyampaikan pendapat	Berbicara/menulis dengan cara yang mudah dimengerti orang lain

Kedua, BIRB tidak boleh menyempitkan pembelajaran/perkuliahan BI semata-mata menjadi persoalan teknis dan urusan benar-salah penerapan kaidah. Tujuan utama pembelajaran/perkuliahan bahasa adalah mengasah kemampuan berpikir, syukur bisa mencapai tataran berpikir kritis. Terkait hal itu, Fairclough (1995: 222) menawarkan model analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*, CDA) untuk membangkitkan kesadaran bahasa kritis (*critical language awareness*, CLA). CLA berbeda dengan kesadaran bahasa (*language awareness*, LA). LA hanyalah *knowledge about language* (pengetahuan tentang bahasa), sedangkan CLA membawa pembelajar pada *awareness of nontransparent aspects of the social functioning of language* (kesadaran atas aspek-aspek pemanfaatan bahasa secara sosial yang tak kasat mata). Fairclough (2010: 531-532) bahkan sampai pada pandangan bahwa CLA menyangkut identitas diri (*self-identity*) yang perlu disadarkan dan dibangun lewat pendidikan.

Ketiga, perlu keterpaduan langkah semua dosen (mata kuliah apa pun) untuk bersama-sama peduli pada BIRB. Hal termudah sekaligus tersulit yang dapat ditempuh adalah pembuatan soal-soal yang menuntut jawaban uraian, dan dosen memberikan penilaian khusus atas bahasa tulis mahasiswa. Ini sungguh memerlukan tekad semua dosen. Tanpa keterpaduan langkah dan tekad, kemampuan ber-BI dan ber-BIRB sulit beranjak maju.

Keempat, perlu diwujudkan keterpaduan kuliah BI dan kebiasaan ber-BIRB dengan tradisi menulis pada dosen. Konkretnya begini. Perkuliahan BI diarahkan pada kemampuan mahasiswa menghasilkan karangan ilmiah (makalah atau artikel jurnal). Agar mahasiswa lebih termotivasi dan terinspirasi, karya ilmiah dosenlah yang dijadikan contoh atau model. Karya ilmiah dosen itu dimuat dalam jurnal prodi atau fakultas sehingga mutu jurnal itu—baik secara isi, bahasa, maupun format—harus sungguh baik. Dengan cara ini, dapat dibangun atmosfer dan tradisi akademik yang menjanjikan dan penuh harapan.

5. PENUTUP

BIRB merupakan kebutuhan untuk memantapkan bahasa Indonesia ragam ilmiah atau ragam akademik. Namun, keberadaan BIRB terkendala oleh sejumlah kenyataan. Pertama, adanya sesat pikir tentang BI dan BIRB, yakni (a) BI disalahpahami sebagai bahasa yang sudah tua dan mapan serta (b) BIRB disalahpahami sekadar urusan EYD (terlalu sempit) atau justru menyangkut penggunaan BI dalam segala keadaan (terlalu luas). Kedua, kekurangpatuhan kepada kaidah BIRB karena (a) latar kesejarahan bahasa Indonesia yang berbeda dengan kebijakan pembakuan BI, (b) inkonsistensi acuan, (c) rendahnya mutu pembelajaran bahasa, (d) rendahnya minat baca dan tulis masyarakat Indonesia, serta (e) mentalitas bangsa Indonesia yang suka *gandrung* pada budaya luar, termasuk bahasa asing.

Berdasarkan keadaan tersebut, direkomendasikan (a) pembentukan kepribadian (karakter) mahasiswa melalui perilaku ber-BIRB pada struktur makro hingga mikro, (b) pembelajaran/perkuliahan BI yang mampu mengasah kemampuan berpikir kritis, (c) keterpaduan langkah semua dosen mata kuliah apa pun untuk bersama-sama patuh pada BIRB, serta (d) keterpaduan kuliah BI dan kebiasaan ber-BIRB dengan tradisi menulis pada dosen.

Tulisan ini diawali dengan kutipan pernyataan Anderson (2002) tentang kehendak untuk membebaskan BI. BIRB disebut Anderson "*membosankennja boekan kepalang, kaku tanpa mutu, apalagi bersifat dusta en pura2*". Boleh jadi Anderson benar karena BIRB menjadi bagian dari politik pemaknaan Orde Baru yang kelewat represif. Namun, Anderson bisa saja salah sebab BI berbeda dengan BE yang secara sosiolinguistik tidak dikepung ratusan bahasa daerah. BIRB sangat diperlukan karena BI ragam ilmiah tidak hanya menuntut acuan bersama, tetapi juga menjadi pergulatan bangsa Indonesia menemukan identitas sebagai

bangsa modern. "Pembakuan" memang terkesan—dan bisa terperosok—menjadi "pembekuan" seperti saat Orde Baru. Oleh karena itu, mendaku dan mengelola BIRB selalu berada dalam tegangan antara pembebasan dan pembekuan.

CATATAN AKHIR

[1] Versi awal artikel ini berupa makalah yang disampaikan dalam Koordinasi Dosen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Selasa, 5 Agustus 2014, di Ruang *Student Lounge,* Kampus II Babarsari.

DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana, Sutan Takdir. 1991. "Sejarah Bahasa Indonesia". Dalam Harimurti Kridalaksana (ed.). 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 95-109.

Anderson, B.R.O"G. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.

----------. 2002. "Beberapa Usul Demi Pembebasan Bahasa Indonesia". Majalah *Tempo*, Edisi Khusus Akhir Tahun, 31 Desember 2001-6 Januari 2002, hlm. 41-42.

Baryadi, I. Praptomo. 2002. *Dasar-dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Gondho Suli.

Collins, James T. 2011. *Bahasa Melayu Bahasa Dunia*. Diterjemahkan dari *Malay, World Language: A Short History* oleh Alma Evita Almanar. Jakarta: KITLV-Pusat Bahasa-Yayasan Obor Indonesia.

Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.

----------. 2010. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Edisi Kedua. Harlow: Pearson.

Fang, Liaw Yock. 2011. *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fill, Alwin dan Peter Mühlhäusler (eds.). 2001. *The Ecolinguistics Reader: Language Ecology and Environment.* London dan New York: Continuum.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Kridalaksana, Harimurti. 1991. "Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dan Kongres Bahasa Indonesia II (1954)". Dalam Harimurti Kridalaksana (ed.). 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 235-269.

----------. 2013. "2 Mei: Hari Jadi Bahasa Indonesia". Dalam *Kompas*, 26 April 2013, hlm. 15.

Mrázek, Rudolf. 2002. *Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Phillipson, R. 1992. *Linguistic Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

Prentice, D.J. 1991. "Perkembangan Bahasa Melayu sebagai Bahasa (Inter)Nasional". Dalam Harimurti Kridalaksana (ed.). 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 180-194.

Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Terjemahan dari *A History of Modern Indonesia since Century 1200*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Subagyo, P. Ari. 2013. "Keadaan Sosial-Budaya Pra-Indonesia 1856-1928: Dari Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia". Laporan Penelitian kepada Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Teeuw, A.A. 1994. *Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan*. Jakarta: Obor.

Wardhaugh, Ronald. 1992. *An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Blackwell.